

EVALUASI MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DAN IMPLIKASINYA

Oleh

Rikson Pandapotan Tampubolon, S.E., M.Si.

Dosen Universitas Putera Batam dan

Koordinator Wilayah Pantau Pemilu Kepulauan Riau

Abstrak

Proses pemilu yang boleh berjalan, namun meninggalkan sejumlah permasalahan yang menjadi noda pada proses pemilu itu sendiri, harus menjadi pelajaran yang berharga bagi anak bangsa ini. Pesta demokrasi kita menjadi sebuah tragedi kemanusiaan untuk sebuah cita-cita yang mulai yaitu usaha melahirkan kepemimpinan yang baru. Kita tidak boleh menganggap permasalahan yang ada menjadi persoalan rutin. Persoalan manajemen menjadi akar dari permasalahan yang membuat silang sengkabut masalah kepemiluan dan menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi karena banyak menimbulkan ribuan korban jiwa, bahkan banyak yang meninggal dunia dari penyelenggara pemilu kita di garda terdepan. Memperbaiki manajemen kepemiluan dengan memperhatikan beban sesungguhnya

dari proses pemilu adalah sebuah keniscayaan. Memperkuat manajemen logistik yang ada, sehingga mampu menurunkan dampak pada permasalahan yang ada. Meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu, agar terhindar dari kekacauan penyelenggaraan



utamanya di daerah. Dan, yang paling penting perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terkait pelaksanaan pemilu serentak, terutama akibatnya banyak korban penyelenggara pemilu di daerah yang menjadi korban pesta demokrasi kita.

Abstract

The electoral process that can run, but leaves a number of problems that stain the electoral process itself, must be valuable lessons for the children of this nation. Our democratic party has become a human tragedy for the ideals that began, namely efforts to give birth to new leadership. We must not consider existing problems to become routine problems. The issue of management is at the root of the problem which makes the electoral problem chaos and sets a bad precedent for the development of democracy because it has caused thousands of fatalities, even many have died from our election organizers at the forefront. Improving electoral management by taking into account the true burden of the electoral process is a necessity. Strengthening existing logistics management, so as to reduce the impact on existing problems. Increasing the understanding of election organizers, so that they avoid the chaos of the main administration in the regions. And, the most important thing needs to be a thorough evaluation related to the implementation of simultaneous elections, especially as a result of the many victims of election organizers in the regions who are victims of our democratic party.

PENDAHULUAN

Indonesia baru saja melaksanakan hajatan pesta demokrasi pada tahun 2019. Pesta demokrasi atau pemilihan umum (pemilu) tahun ini merupakan babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemilu dilaksanakan serentak setanah air untuk memilih presiden dan wakil presiden, para legislatif baik itu DPR, DPD, DPRD tingkat satu dan tingkat dua.

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika telah bekerja ekstra keras dalam menyelesaikan kegiatan ini. Kondisi geografis yang berbentuk kepulauan dan tantangan infrastruktur yang belum merata sampai ke pelosok-pelosok daerah menambah berat tantangan

menyukseskan kegiatan tersebut.

Pemilu serentak yang baru saja terlaksanakan secara garis besar berjalan cukup lancar. Namun, masih banyak perbaikan yang harus diperhatikan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi ini kedepannya. Utamanya, catatan hitam yang membuat pesta demokrasi ini berat untuk mengatakan sukses besar. Akibatnya banyaknya meninggal para penyelenggara pemilu di garda terdepan. Ribuan penyelenggara pemilu menjadi korban dan meninggal akibat tekanan pekerjaan pemilu yang demikian berat dan terkesan tidak dipersiapkan dengan matang dan penuh perencanaan serta pengawasan. Akibatnya negara kita harus mengikhlaskan anak-anak bangsanya harus menjadi



martir dalam pendewasaan demokrasi kita. Pesta demokrasi kita menjadi sebuah tragedi kemanusiaan untuk sebuah cita-cita yang mulai yaitu usaha melahirkan kepemimpinan yang baru.

Kompleksitas permasalahan yang menyangkut kepemiluan ini secara umumnya diakibatkan oleh pemilu serentak. Beratnya beban pemilu dan manajemen logistik yang terlambat ke lokasi seperti yang direncanakan menjadi akar permasalahan, serta minimnya pemahaman penyelenggara pemilu utamanya di daerah-daerah membuat silang sengkabut persoalan pemilu kita menjadi semakin berat.

Ada banyak lagi persoalan yang masih menghantui perkembangan demokrasi kita, diantaranya *money politic*, penggunaan

politik identitas yang masih marak, manajemen administrasi kepemiluan yang membuat kegaduhan yang harusnya tidak perlu dan sebagainya (Fernandes, 2019). Namun penulis disini membatasi jurnal ini dalam persoalan manajemen pelaksanaan pemilu guna memperbaiki pelaksanaan pemilu ke depan agar lebih baik lagi.

IMPLIKASI PEMILU SERENTAK

Melihat banyaknya kesemerawutan pelaksanaan pemilu serentak ini, banyak tokoh yang berpendapat bahwa perlu dilakukannya evaluasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar pemilu dipisahkan dalam beberapa tingkatan, yakni: Pilpres bisa digelar bersamaan dengan

Pileg untuk DPR, Pemilihan Gubernur dengan Pileg DPRD provinsi, dan Pemilihan Bupati/Walikota dengan Pileg DPRD Kabupaten/Kota. Usul senada disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut pemilu serentak mampu mengurangi beban penyelenggara pemilu. Namun, Perludem menilai sistem yang berlaku saat ini bukan pemilu serentak, melainkan borongan.

Menyikapi hal ini, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebutkan ada wacana memisahkan pemilu serentak di tingkat daerah dengan pemilu serentak di tingkat nasional. Wacana itu, kata Hasyim, berasal dari riset evaluasi terhadap

penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2014.

Berdasarkan persoalan dan beberapa pendapat diatas, penulis sepakat jika diperlukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak. Sejak awal terdapat kelemahan dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan Pemilu serentak. Keputusan MK seharusnya diikuti oleh proses penyusunan kebijakan berbasis bukti dengan data yang kuat, berdasarkan simulasi terhadap penyelenggaraan. Dengan demikian, beban penyelenggaraan pemilu dapat diidentifikasi sejak awal dan langkah-langkah untuk mitigasi resiko dapat dipikirkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Shaxson, keputusan kebijakan harus diambil berdasarkan sejumlah bukti yang kuat, bukan hanya



satu atau dua laporan penelitian. Hal ini menjamin bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pandangan yang luas dari isu tersebut. Sebagian besar kebijakan bersifat interdisipliner dan membutuhkan pengetahuan yang berbeda-beda. Terkait dengan bukti sebagai basis kebijakan, terdapat empat jenis yaitu, pertama, data statistik dan administratif, yang membantu menggambarkan kondisi terkini dari suatu isu dan menjelaskan tren historis. Kedua, bukti berbasis penelitian, yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Ketiga, bukti dari masyarakat dan pemangku kepentingan (seperti organisasi masyarakat sipil atau pelaku usaha), yang berkontribusi pada pemahaman kita tentang siapa yang menilai kebijakan dan bagaimana kemungkinan

mereka akan menanggapi. Keempat, bukti dari evaluasi, yang membantu menjelaskan keberhasilan di masa lalu atau dalam situasi yang serupa. Semua jenis bukti yang berbeda ini dipetakan untuk mencapai sasaran kebijakan. (Shaxson, 2019)

Begitu juga menurut Arfianto Purbolaksono, evaluasi berbasis riset terhadap pelaksanaan Pemilu serentak wajib untuk dilakukan. Hasil riset evaluasi tersebut harus menjadi rujukan untuk perbaikan kebijakan penyelenggaraan Pemilu ke depannya.

EVALUASI TATA KELOLA MANAJEMEN PEMILU SERENTAK

Menurut Fitra, Indonesia memiliki sistem baru di mana pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif

dilakukan secara serentak. Sistem pemilu ini perlu dievaluasi karena baru pertama kali dilakukan. Hal kedua, yang perlu dievaluasi menurut Fitra adalah tata kelola manajemen penyelenggaraan. Misalnya, perlu diketahui penyebab 300 orang lebih petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia. Padahal, menurut Fitra, pemilu 2019 hanya menambah satu kotak suara, yaitu kotak suara pilpres yang cenderung sederhana. Kemudian, hal ketiga yang perlu dievaluasi adalah soal integritas penyelenggara atau peserta pemilu. Menurut Fitra, perlu dicari tahu apakah masalah yang timbul akibat direncanakan atau karena kelalaian.

Aspek manajemen penyelenggaraan pemilu, beban penyelenggara pemilu lebih proporsional, dan tidak

terjadi penumpukan beban yang berlebih. Selain itu, format ini disebut menguntungkan pemilih dan peserta pemilu. Sebab mereka bisa fokus mengawal isu daerah dan nasional di waktu yang berbeda, tidak seperti saat ini, isu daerah tertutup isu pilpres. Aspek kampanye, isu-isu kampanye semakin fokus dengan isu nasional dan isu daerah yang dikampanyekan dalam pemilu yang terpisah.

Pemilu Serentak 2019 menimbulkan polemik dengan banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia diduga kelelahan bekerja nonstop dalam perhitungan suara. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyatakan, faktor besar yang menyebabkan masalah pemilu adalah manajemen kepemiluan.



Diantaranya beban yang tadinya dipikirkan oleh kita secara praktik lapangan lebih dari yang dipikirkan. Kejadian yang tidak terduga misalnya ada di jajaran KPPS yang sudah menyiapkan TPS dari malam sebelum 17 April dan bekerja hingga subuh 18 April sehingga kelelahan. Begitu juga manajemen distribusi logistik, karena H-1 misalnya masih banyak logistik yang belum lengkap di masing-masing TPS dan lain-lain. Pasca kejadian ini, untuk itu penting untuk memikirkan bagaimana kita membuat pemilu dengan sistem efisien dengan tidak melelahkan.

KONSEPSI PRINSIP MANAJEMEN

Menurut Stoner dkk., manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

pengendalian, aktivitas anggota organisasi, dan kegiatan yang menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Jones dan George).

Pentingnya perencanaan dalam setiap program atau kebijakan harus menjadi perhatian pengambil keputusan terkait. Lazimnya setiap proses perencanaan tentunya didahului dengan sejumlah analisa aspek internal dan eksternal, serta memperhatikan kecenderungan tantangan kedepan. Pemilu sebagai sebuah program yang dipersiapkan untuk merekrut



calon-calon pemimpin bangsa kedepan harus selalu diperbaharui sistem organisasinya.

Perencanaan yang baiknya tentunya perencanaan yang berhasil mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi sehingga kita dapat memperoleh tujuan yang efektif dan efisien. Dalam pemilu ini terlihat adanya ketidaksempurnaan dalam melakukan proses perencanaan. Jatuhnya banyak korban dalam penyelenggaraan pemilu ini dapat kita simpulkan salah satunya akibat dari lemahnya sistem perencanaan yang dibuat sehingga gagal mengantisipasi sepenuhnya apa yang akan terjadi dilapangan.

Pemilu serentak kali ini adalah yang pertama dilakukan oleh negara ini. Tidak adanya

pengalaman dan belum baiknya pemahaman kita dalam penyelenggaraan tersebut harusnya pemilu ini dikerjakan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan. Agar kita dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dilapangan untuk meminimalisir segala dampak yang akan terjadi. (Triono, 2017)

Segala upaya yang dilakukan oleh sumber daya manusia untuk mengalokasikan segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut untuk memperoleh tujuan adalah definisi dari pengorganisasi yang baik. Organisasi dituntut harus mampu memaksimalkan segala sumber daya yang ada dengan tetap memperhatikan prinsip dan asas pemilu yang ada dan etika dalam pemanfaatan

tenaga kerja yang humanis dan berkeadilan.

Penyelenggaraan pemilu ini telah memberikan kewenangan secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyukseskan hajatan pesta demokrasi di negara ini sampai ke daerah-daerah. Negara telah memberikan segala fasilitas dan kewenangan yang diperlukan untuk menyukseskan kegiatan kepemiluan. Untuk itu, harusnya penyelenggara pemilu harus tampil prima dalam melaksanakan setiap gelaran pemilu. (Solihah, 2018)

Penyelenggara pemilu berdasarkan mandat yang telah diberikan oleh undang-undang

harus benar-benar memperhatikan setiap detail pengorganisasian yang ada. Jangan sampai segala ketiadaan perhatian yang baik dalam hal pengorganisasian membuat pelaksanaan pemilu berjalan dengan kekacauan akibat lemahnya pengorganisasian. (Herawati, Sukma & Hannato, 2019)

Salah satu fungsi manajemen untuk memastikan apakah rencana yang sudah ditetapkan berjalan sesuai adalah dengan cara memastikan fungsi pengarahan. Adanya adagium yang mengatakan setiap manusia yang diberikan tanggung jawab pada dasarnya potensial untuk tidak melakukan pekerjaannya dengan benar tentunya membutuhkan fungsi pengarahan. Baik itu dilakukan



secara sadar maupun tidak sadar.

Penyelenggara pemilu harus tetap memperhatikan fungsi pengarahan guna memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan secara baik. Baik itu pengarahan yang dilakukan dalam memulai proses maupun saat proses pemilu itu dilakukan. Sehingga kita dapat betul-betul bisa memastikan segala perencanaan yang baik yang telah kita tetapkan dapat berjalan sesuai rencana yang sudah kita tetapkan.

Namun harus kita pahami bersama bahwasanya fungsi pengarahan ini tentunya boleh berjalan secara baik karena pemahaman akan tugas dan tanggung jawab yang baik. Ketidadaan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab ini tentunya akan membuat fungsi

pengarahan kehilangan fungsinya.

Pengawasan memegang peranan penting dalam fungsi-fungsi manajemen. Pengawasan pemilu mutlak diperlukan untuk menghindari segala kemungkinan buruk dalam penyelenggaraan pemilu. Pengawasan atau evaluasi diperlukan guna memberikan masukan kepada pengambil keputusan untuk melakukan proses lebih baik lagi. Tanpa adanya pengawasan tentu kita sulit berharap ada hasil yang benar. (Solihah, Bainus & Rosyidin, 2018)

Dalam proses perencanaan berikutnya tentulah hasil evaluasi atau pengawasan mutlak diperlukan sebagai basis perencanaan yang baru. Namun bagaimana seandainya ketika sesuatu hal yang baru yang belum pernah



kita alami harus kita hadapi? Misalnya pemilu serentak ini. Jawabannya tentu saja dengan cara melihat studi perbandingan yang ada untuk memberikan gambaran yang maksimal serta memberikan segala pertimbangan yang mungkin akan dihadapi ketika menyelenggarakan sesuatu yang belum kita alami.

Pemilu serentak ini adalah hasil buah pemikiran para anak-anak bangsa dengan pro dan kontra untuk memberikan kesan pemilu yang efektif dan efisien. Namun dibalik itu semua, potensi buruk dari sistem dan metode itu harus selalu diantisipasi agar tidak menjadi bumerang bagi yang menginginkan sistem pemilu yang lebih efektif dan efisien. (Ellydar Chaidir, 2017)

PENUTUP

Proses pemilu yang boleh berjalan namun meninggalkan sejumlah persoalan yang menjadi noda pada proses pemilu itu sendiri, harus menjadi pelajaran yang berharga bagi anak bangsa ini. Kita tidak boleh menganggap permasalahan yang ada menjadi persoalan rutin. Persoalan manajemen menjadi akar dari permasalahan yang membuat silang sengkut masalah kepemiluan dan menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi karena banyak menimbulkan korban jiwa dari penyelenggara pemilu kita di garda terdepan. Memperbaiki manajemen kepemiluan dengan memperhatikan beban sesungguhnya dari proses pemilu.

Begitu juga perlu diperhatikan dan dievaluasi



total memperkuat manajemen logistik yang ada sehingga mampu menurunkan dampak pada permasalahan yang ada. Meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu, agar terhindar dari kekacauan penyelenggaraan di daerah. Hal ini diatas dan pembahasan yang ada menjadi alasan perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terkait pelaksanaan pemilu serentak, terutama akibatnya banyak korban penyelenggara pemilu di daerah menjadi korban penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ellydar Chaidir, S. (2017). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden*. UIR Law Review. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.561>
- Fernandes, A. (2019). *Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas*. Centre For Strategic And International Studies.
- Herawati, R., Sukma, N. M., & Hananto, U. D. (2019). *Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.

- Jones, Gareth R. dan Jennifer M George. 2010. *Contemporary Management*. New York: McGraw Hill.
- Shaxson, L. (2019). *Uncovering the practices of evidence-informed policy-making*. Public Money and Management. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1537705>
- Solihah, R. (2018). *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis*. Jurnal Wacana Politik. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.
- Stoner, James A.F., Edward Freeman, dan Daniel R Gilbert. 1995. *Management*. New Jersey: Prentice Hall
- Triono, T. (2017). *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Wacana Politik. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>.
- Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. <https://nasional.tempo.co/read/1198733/dari-jk-hingga-mantan-ketua-mk-usulkan-evaluasi-pemilu-serentak, diakses tanggal 27 Agustus 2019>.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423112158-32-388749/evaluasi-2019-kpu-wacanakan-pemilu-serentak-dipisah, diakses tanggal 27 Agustus 2019>.

